

DINAMIKA MENJELANG PENDIRIAN PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK PADA TAHUN 1992-1996

Vicky Verry Angga¹, Juwita Anggraini²

¹Universitas Diponegoro,
vickyverry@yahoo.co.id

²Universitas Sebelas Maret,
juwita3@gmail.com

ABSTRAK

Pemerintah Orba dalam melaksanakan kekuasaannya hampir selalu melakukan tindakan represif terhadap rakyat. Pemerintah Orba juga mempraktikkan demokrasi semu dalam praktik politik masa itu. Kondisi ini menimbulkan ketidakpuasan dari pemuda dan aktivis. Pada 1992, komite aksi mulai muncul dan terus berkembang di tahun-tahun berikutnya. Aliansi-aliansi mahasiswa kemudian berkembang menggantikan peran komite aksi. Aliansi mahasiswa berkembang menjadi organisasi sektoral mahasiswa, buruh, tani, dan kebudayaan. Organisasi sektoral membuat perjuangan melawan Orba menjadi terkotak-kotak. Kumpulan dari berbagai organisasi sektoral kemudian membentuk Persatuan Rakyat Demokratik sebagai wadah bersama pada 1994. Persatuan Rakyat Demokratik dalam perjalanannya tidak berjalan lancar, terjadi perbedaan pendapat antar anggota. Persatuan Rakyat Demokratik mengalami perpecahan dan melahirkan ide pendirian partai dari sebagian anggota. Pendirian partai melalui proses yang tidak mudah di dalam organisasi. Kongres Luar Biasa 1996 memutuskan pendirian Partai Rakyat Demokratik. Berdirinya partai diharapkan membuat pergerakan menjadi semakin radikal. Partai sebagai simbol perlawanan terhadap sistem demokrasi semu yang diterapkan Orba. Partai juga dapat digunakan sebagai media perlawanan terhadap hegemoni Orba.

Kata Kunci: Partai Rakyat Demokratik, Orde Baru, Partai Politik

ABSTRACT

The Orba government in carrying out its power is almost always repertive acts of the people. The Orba government also practiced an all-out democracy in the political practice of the day. The condition is inflicting discontent of young men and activists. In the 1992, the action committee began to appear and continue to evolve in the next years. The alliances of student alliances then flourished the role of the action committee. Student alliances evolved into a sectoral student organization, laborers, farms, and culture. Sectoral organizations make a struggle against Orba into boxes. The gathering of sectoral organizations then formed the Democratic People's Unity together in 1994, the Democratic People's Unity on its journey didn't go well, there was a difference of opinion between members. The Democratic People's Unity experiences split and delivers the idea of the party's establishment of members. The party's establishment through an uneasy process in the organization. The Extraordinary Congressman 1996 decided the Democratic People Party's foundation. Party is expected to make the movement get radical. Party as a symbol of resistance to your formal democracy system applied by Orba. The party can also be used as a media resistance against the Orba Hegemoni.

Keyword: Democratic People's Party, New Order, Political Party

PENDAHULUAN

Presiden Soeharto yang menggantikan Soekarno pada awalnya membawa angin segar bagi demokrasi di Indonesia. Soeharto dipercaya memiliki komitmen untuk melaksanakan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.¹ Namun demikian, dalam tataran praktik komitmen tersebut tidak benar-benar dilaksanakan, karena Soeharto lebih disibukkan oleh usaha untuk melakukan konsolidasi dan memertahankan kekuasaan politiknya. Sebagai contohnya, selama masa pemerintahan Orde Baru (Orba) pemilu rutin selalu dilakukan setiap lima tahun, namun pelaksanaan pemilu dari tahun 1971 hingga 1997 bisa dikatakan hanya mempraktikkan demokrasi semu. Makna demokrasi semu ialah pelaksanaan pemilu Orba yang direkayasa dengan cara-cara yang anti demokrasi. Berbagai aturan dan tata cara dimanipulasi untuk memenangkan salah satu peserta pemilu (Golkar) sebagai mesin politik Orba.²

Praktik politik sepanjang Orba menunjukkan kecenderungan terjadinya pemudaran demokrasi dan perampasan hak politik rakyat. Enam kali Pemilu pada masa pemerintahan Orba di bawah pimpinan Presiden Soeharto, selalu dimenangkan oleh Golkar dengan suara signifikan yang memiliki selisih jauh dengan pesaingnya. Golkar pada dasarnya adalah hasil ciptaan para penguasa militer dan tidak dapat dipisahkan identitasnya dari mereka. Golkar adalah sebuah federasi majemuk yang dimobilisasi pihak tentara secara temporer dengan maksud untuk melemahkan kedudukan partai-partai politik.³

Dalam pandangan politik pemerintah Orba di bawah pimpinan Presiden Soeharto, stabilitas politik nasional sebagai prasyarat penting untuk melakukan pembangunan ekonomi dan oleh karena itu berbagai tindakan represi dilakukan terhadap berbagai elemen masyarakat, baik di tingkat atas maupun tingkat bawah. Berbagai tindakan represi yang dilakukan oleh pemerintah Orba antara lain terhadap pers dengan melakukan pembredelan terhadap beberapa media massa, intelektual dan kampus dengan melarang penerbitan buku yang dianggap pemerintah berhaluan kiri, serta kelompok marginal dengan tindakan kekerasan terhadap rakyat. Rezim pemerintahan Orba yang represif dapat dilihat dari konsep *bureaucratic authoritarianism* (otoritarianisme birokratik), yakni suatu bentuk negara otoriter yang cukup kuat dan terpadu, yang melibatkan diri dalam berbagai kegiatan masyarakat.⁴ Pemerintahan Orba yang represif karena trauma-trauma

¹M.C. Ricklefs, *A history of Modern Indonesia 1200-2004* (Stanford: Stanford University Press, 2001), hlm. 568-569.

²Ilham Khoiri, "Pemilu 1971 Demokrasi Semu", *Kompas*, 11 Januari 2014

³Harold Crouch, *Militer dan Politik di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), hlm. 303.

⁴Budi Rajab, "Negara Orde Baru: Berdiri di Atas Sistem Ekonomi dan Politik yang Rapuh", *SOSIOHUMANIORA*, Vol. 6, Nomor 3, November 2004, hlm. 185.

yang dialami oleh pemimpin Orba sebagai akibat dari berbagai gejolak politik yang terjadi pada tahun 1960-an, mendorong mereka untuk menciptakan kebijakan pembangunan politik yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang secara politis penurut.⁵

Tindakan represif Orba dan kondisi politik saat itu menimbulkan perlawanan dari kaum muda yang diwakili oleh kalangan mahasiswa dan kelompok terpinggirkan menjadi lebih keras dan terbuka. Salah satu bentuk perlawanan itu adalah pendirian organisasi Partai Rakyat Demokratik (PRD). Embrio pembentukan PRD muncul pada tahun 1992, melalui proses yang Panjang berdirilah PRD pada tahun 1996. PRD didirikan bertujuan mewujudkan masyarakat demokratis multipartai kerakyatan dan mewujudkan sistem masyarakat yang demokratis di bidang sosial, ekonomi, dan budaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.⁶ Heuristik merupakan proses pencarian sumber primer dan sumber sekunder.⁷ Sumber primer diperoleh dari kegiatan observasi, arsip pemerintah atau individu, foto kegiatan observasi, dan wawancara pelaku sejarah dalam pendirian PRD. Wawancara mengenai bagaimana dinamika menjelang pendirian PRD tahun 1992 dan hingga ketika pendirian PRD pada 1996. Sumber sekunder diambil dari tulisan yang relevan dengan penelitian diambil dari buku, jurnal, dan pustaka lain. Sumber sekunder dapat diperoleh dari perpustakaan, koleksi pribadi, dan internet. Sumber yang telah tersedia kemudian dikritik dan diinterpretasikan. Hasil analisis diatas kemudian dihubungkan dan direkonstruksi menjadi sebuah artikel tentang Dinamika Menjelang Pendirian Partai Rakyat Demokratik Pada Tahun 1992 - 1996.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Komite Aksi sebagai Embrio Partai Rakyat Demokratik

Komite aksi yang mulai timbul saat itu tidak lepas dari represi pemerintah Orba terhadap rakyat. Kalangan intelektual muda di beberapa tempat memprakarsai tumbuhnya kesadaran melawan pemerintah Orba. Kesadaran melawan pemerintah Orba bukan hanya untuk kepentingan kalangan intelektual muda namun juga menuntut keadilan bagi rakyat. Keberhasilan terbentuknya berbagai komite-komite aksi diberbagai wilayah mendorong para mahasiswa untuk membentuk aliansi-aliansi. Bentuk aliansi-aliansi tersebut bersifat

⁵Loekman Soetrisno, "Lima Puluh Tahun Kita Membangun Ekonomi dan Politik Indonesia" dalam Loekman Soetrisno, et al, *Menyingkap Retorika dan Realita: Refleksi dan Visi Jejak 50 Tahun Indonesia* (Bandung: AKATIGA, 1995), hlm. 8.

⁶Gilbert Garraghan., *A Guide to Historical Method* (New York: Fordham University Press, 1947)

⁷Nina Herlina., *Metode Sejarah* (Bandung: Satya Historika, 2008)

kedaerahan berdasarkan kota-kota tempat berdirinya kampus. Aliansi-aliansi mahasiswa yang terbentuk diantaranya aliansi mahasiswa Jakarta (SMJ dan Pijar), Bandung (KPMB dan PMIB), Yogyakarta (SMY dan FKMY), Semarang (SMS), Surakarta (IMS), dan Salatiga (SMST).⁸ Beberapa kelompok aliansi-aliansi mahasiswa merasa bahwa kegiatan yang telah dilakukan tidak akan efektif tanpa adanya sebuah payung pemersatu. Beberapa anggota aliansi-aliansi mahasiswa memiliki pemikiran untuk menyatukan gerakan dalam sebuah wadah yang lebih formal. Sehingga kegiatan pembelaan terhadap rakyat berjalan efektif dan terjadi persamaan visi dari setiap komite aksi yang ada di Indonesia.

Sebuah organisasi yang terdiri dari beberapa aliansi mahasiswa di Indonesia akhirnya terbentuk, yang bernama Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID). Organisasi ini didirikan pada November 1992 atas prakarsa dari komite aksi mahasiswa dari Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Solo, dan Salatiga.⁹ Organisasi pembentuk SMID ialah Solidaritas Mahasiswa Yogyakarta (SMY), Ikatan Mahasiswa Solo (IMS), Solidaritas Mahasiswa Salatiga (SMST), Solidaritas Mahasiswa Semarang (SMS), Solidaritas Mahasiswa Jakarta (SMJ), FKMY Yogyakarta, FKMS Surabaya, Rode, ARENA, dan kelompok mahasiswa dari Lampung, Makassar, Palu, serta Medan. SMID baru dideklarasikan melalui Kongres di Bogor, 1-2 Agustus 1994.¹⁰ Kongres di Bogor tidak berjalan sampai akhir karena Kongres dibubarkan oleh aparat keamanan. Kongres dipindahkan ke Depok untuk menyelesaikan agenda Kongres. Peserta Kongres terdiri dari perwakilan organisasi lokal mahasiswa Surakarta, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Palu, Medan, Jakarta, Makassar, dan Lampung. Kongres dihadiri kurang lebih 100 orang peserta.¹¹

Ketua pertama SMID ialah Munif Laredo, sebelum digantikan oleh Andi Arif sebagai Ketua dan Nezar Patria sebagai sekretaris dalam Kongres SMID di Purwokerto tahun 1996.¹² SMID menjalin jejaring internasional dengan bergabung dalam *Asian Student Association* (ASA) yang bersekretariat di Hongkong.¹³ SMID menandai kemunculan suatu gerakan mahasiswa yang mempunyai ideologi, gagasan, program, dan strategi taktik perjuangannya.

⁸Irine H. Gayatri, "Arah Baru Perlawanan Gerakan Mahasiswa" dalam Muridan Widjojo, et al., *Penakluk Rezim Orde Baru, Gerakan Mahasiswa 1998* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), hlm. 90-93.

⁹PRD, *Demi Demokrasi, Partai Rakyat Demokratik (PRD) Menolak Takluk* (Jakarta: Partai Rakyat Demokratik, 1999), hlm. 16.

¹⁰Wawancara Kelik Ismunanto, 25 Mei 2017 dan Irine H. Gayatri, "Arah Baru Perlawanan Gerakan Mahasiswa" dalam Muridan Widjojo, et al., *Penakluk Rezim Orde Baru, Gerakan Mahasiswa 1998* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), hlm. 93.

¹¹Wawancara Kelik Ismunanto, 25 Mei 2017.

¹²Wawancara Kelik Ismunanto, 25 Mei 2017.

¹³Budiman Sudjatmiko, *Anak-Anak Revolusi Jilid I* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 414.

SMID dalam strategi dan taktiknya bertujuan memajukan gerakan mahasiswa menjadi gerakan rakyat.¹⁴ SMID memiliki program diantaranya adalah pencabutan Dwifungsi ABRI, referendum bagi rakyat Maubere (Timor Leste), dan peningkatan kesejahteraan buruh dan petani.¹⁵

SMID yang mulai muncul juga diikuti dengan pendirian organisasi lain yang memiliki tujuan yang hampir sama. Organisasi baru itu tidak hanya beranggotakan mahasiswa, namun masyarakat secara umum dari berbagai latar belakang kelompok masyarakat. Organisasi tersebut terdiri dari Serikat Tani Nasional (STN), Pusat Perjuangan Buruh Indonesia (PPBI), dan Jaringan Kerja Kesenian Rakyat (Jakker). SMID memiliki sumbangsih besar dalam mendorong terbentuknya STN, PPBI, dan Jakker.¹⁶

STN merupakan sebuah wadah perjuangan kaum tani yang didirikan oleh kaum tani bersama aktivis-aktivis mahasiswa. STN berdiri atas inisiasi dari Komite Rakyat Jogja dan organisasi tani Jawa Barat, tokohnya terdiri dari Budiman Sudjatmiko, Web Warouw, Awang Trisna Murti, Siti Rubaidah (Komite Rakyat Jogja), dan Agus Tiana (organisasi tani Jawa Barat). Ketua STN ialah Budi Sanyoto, seorang petani dari Semarang. STN didirikan dalam pertemuan yang dilakukan di Mangkuyudan, Mantrijeron, Yogyakarta. Pertemuan tersebut dihadiri perwakilan organisasi petani yang diorganisir oleh Komite Rakyat Jogja. STN memiliki kegiatan untuk mengorganisir aksi-aksi petani, pendidikan politik kepada petani, dan pendidikan kader. Materi dalam pendidikan kader antara lain tentang masalah petani, tentang problem masyarakat Indonesia, dan tentang cara petani berjuang memerdekakan dirinya.¹⁷ Pendirian STN merupakan sebuah keberanian di masa Orde Baru, karena pemerintah saat itu hanya mengakui organisasi tunggal petani yaitu Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).

PPBI merupakan wadah perjuangan kaum buruh berskala nasional. PPBI didirikan pada tahun 1994, Dita Indah Sari terpilih menjadi Ketua Umum. PPBI memiliki program kerja untuk menuntut penghentian intervensi militer dalam kasus perburuhan, kenaikan upah 100%, dan upah Rp. 7.000,- per hari. PPBI dalam pergerakan berani memasukkan isu-isu politik, tidak seperti kelompok-kelompok buruh lainnya yang hanya melakukan tuntutan normatif. Konsentrasi pergerakan PPBI dilakukan di kota-kota besar di Jawa, seperti Jabodetabek, Semarang, Surakarta, dan Surabaya. PPBI dan SBSI Mochtar Pakpahan menjadi serikat buruh yang independen di masa Orde Baru.¹⁸ Pendirian PPBI dapat dikatakan sebagai keberanian kaum buruh di

¹⁴PRD, *Demi Demokrasi, Partai Rakyat Demokratik (PRD) Menolak Takluk*, hlm. 16.

¹⁵Wawancara Petrus Hariyanto, 17 Juli 2017.

¹⁶Wawancara Kelik Ismunanto, 25 Mei 2017.

¹⁷Wawancara Siti Rubaidah, 13 Juli 2017.

¹⁸Wawancara Lukman Halim, 18 Juli 2017.

masa Orde Baru, mengingat bahwa saat itu pemerintah hanya memperbolehkan buruh tergabung dalam serikat buruh yang dibentuk pemerintah yakni Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI).

Jakker merupakan organisasi yang menekankan bahwa perjuangan budaya tidak dapat dipisahkan dari perlawanan kaum tertindas secara keseluruhan. Jakker didirikan pada tahun 1993, ketua dipegang oleh Wiji Thukul sedangkan sekretaris diamanatkan pada Antun Joko Susmana. Kantor pusat Jakker berada di Surakarta, karena sang ketua Jakker; Wiji Thukul, berdomisili di Surakarta. Jakker melakukan aktivitas seperti pembentukan komunitas-komunitas seni budaya di kota-kota serta di kampus, memperluas jaringan individu antar pekerja seni, melakukan kegiatan kesenian, dan mengadakan seminar, diskusi, maupun bedah buku. Jakker ikut aktif dalam menyikapi isu-isu politik kebudayaan. Jakker memiliki tujuan untuk membongkar budaya bisu serta menuntut dibukanya kebebasan berekspresi.¹⁹ Pembentukan organisasi kesenian yang sangat kritis terhadap pemerintah di masa Orba merupakan hal yang baru. Pemberian nama organisasi yang hampir mirip dengan nama organisasi budaya PKI bernama Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) tentu sangat sensitif di masa itu. Jakker pasti akan segera diberikan label komunis atau PKI, meskipun Jakker tidak ada hubungan dengan Lekra (PKI) atau menganut komunisme.

SMID dan organisasi sektoral yang lahir saat itu ternyata belum memuaskan para aktivis, dimana para aktivis memerlukan wadah yang lebih besar lagi demi tercapainya tujuan bersama mereka. Aktivis tersebut berusaha mengumpulkan organisasi-organisasi sektoral untuk disatukan dalam sebuah wadah organisasi yang besar. Penyatuan organisasi ini diharapkan membuat koordinasi perjuangan para aktivis menjadi lebih mudah dan keberhasilan aksi mejadi lebih tinggi. Organisasi baru itu diharapkan dapat menjadi payung perjuangan lintas sektoral.

2. Terbentuk Persatuan Rakyat Demokratik

Cita-cita yang tinggi dan keinginan yang semakin besar dari kaum aktivis membuat mereka tidak hanya puas dengan organisasi antar sektoral yang berdiri sendiri. Para aktivis memikirkan sebuah perjuangan dengan sebuah wadah organisasi yang mampu mewakili berbagai kelompok atau golongan, tidak terkotak-kotak dalam organisasi sektoral. Melalui serangkaian proses kemudian tercetus sebuah organisasi bernama Persatuan Rakyat Demokratik, dimana SMID, STN, PPBI, dan Jakker tergabung didalamnya.

SMID menjadi penggagas pertemuan pertama untuk pembentukan Persatuan Rakyat Demokratik.²⁰ Pada April 1994, terjadi pertemuan antar

¹⁹Wawancara Antun Joko Susmana, 14 Juli 2017.

²⁰Wawancara Kelik Ismunanto, 25 Mei 2017.

elemen-elemen gerakan SMID, STN, PPBI, maupun Jakker dan disepakati untuk membentuk organisasi payung perlawanan rakyat yang bernama Persatuan Rakyat Demokratik. Persatuan Rakyat Demokratik dideklarasikan pada 2 Mei 1994 di gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI) sebagai organisasi untuk perlawanan rakyat.²¹ Sugeng Bahagio terpilih sebagai ketua dan kepengurusan dibantu oleh para aktivis seperti Tumpak Sitorus, Juli Eko Nugroho, Aris Arif Mundayat, Benu Hidayat, dan Amber.²² Persatuan Rakyat Demokratik memiliki program utama yaitu, menuntut dibukanya ruang demokrasi seluasnya, dengan pencabutan paket 5 UU Politik Tahun 1985 dan Dwifungsi ABRI.²³ Persatuan Rakyat Demokratik dimaksudkan agar rakyat yaitu petani, buruh, kaum miskin perkotaan, mahasiswa dan elemen bangsa lainnya, bersatu dan bangkit melawan sistem kediktatoran militeristik Orde Baru untuk membangun demokrasi di Indonesia.²⁴

Persatuan Rakyat Demokratik berusaha menampung dan memayungi rakyat yang melakukan perlawanan, kondisi saat itu dibaca oleh para pendiri bahwa rakyat sudah melawan pemerintah tetapi masih terpecah-pecah sehingga perlu ditampung di Persatuan Rakyat Demokratik.²⁵ Pembentukan Persatuan Rakyat Demokratik sebagai organisasi yang secara terbuka menyatakan dirinya melawan pemerintah diperlukan sebagai bentuk kepemimpinan politik perlawanan.²⁶ Kelahiran Persatuan Rakyat Demokratik menjadi sebuah pembeda dalam perpolitikan masa Orba, mengingat saat itu belum ada satu organisasi massa yang secara terang-terangan melawan pemerintahan Orba.

Persatuan Rakyat Demokratik dalam perjalannya tidak berjalan mulus seperti kehendak para aktivis dan program-program organisasi gagal terlaksana. Terjadi permasalahan internal organisasi, anggota organisasi mulai tidak percaya terhadap pengurus terpilih. Pengurus terpilih Persatuan Rakyat Demokratik semakin tidak mendapat kepercayaan dari anggota ketika pengurus tidak mampu mengambil sikap tegas mengenai kasus pembredelan Tempo, Editor, dan Detik di tahun 1994. Aspirasi anggota menginginkan diadakannya aksi mogok makan untuk menentang pembredelan Tempo, Editor, dan Detik, namun aspirasi anggota tidak dijalankan oleh pengurus. Anggota beranggapan bahwa pengurus terpilih mencoba menghindari dari anggota dan berjalan sendiri sesuai dengan keinginan pengurus. Persatuan Rakyat Demokratik saat itu juga belum mampu membuat cabang-cabang di daerah.²⁷

²¹Wawancara Petrus Hariyanto, 17 Juli 2017.

²²Budiman Sudjatmiko., *Anak-Anak Revolusi Jilid I*, hlm. 412.

²³PRD, *Demi Demokrasi, Partai Rakyat Demokratik (PRD) Menolak Takluk*, hlm. 21.

²⁴Wawancara Agus Jabo Priyono, 3 November 2014.

²⁵Wawancara Kelik Ismunanto, 25 Mei 2017.

²⁶ Wawancara Petrus Hariyanto, 17 Juli 2017.

²⁷Wawancara Petrus Hariyanto, 17 Juli 2017.

Demi penyelamatan organisasi maka dibentuklah Komite Penyelamat Organisasi Persatuan Rakyat Demokratik (KPO-PRD) pada bulan Agustus 1995 yang dipimpin oleh Budiman Sudjatmiko.²⁸ KPO-PRD kelahirannya dimotori oleh SMID yang mengambil alih kepemimpinan politik di Persatuan Rakyat Demokratik. Juli Eko Nugroho seorang anggota KPO-PRD dan pengurus terpilih yang lama, berusaha untuk menyelamatkan organisasi dengan mengunjungi anggota pendiri Persatuan Rakyat Demokratik satu persatu. Juli Eko Nugroho melakukan serangkaian kunjungan untuk meminta dukungan anggota tentang pembentukan Presidium Sementara Persatuan Rakyat Demokratik (PS-PRD). Anggota menyetujui pembentukan PS-PRD pada September 1995. PS-PRD diketuai oleh Budiman Sudjatmiko.²⁹ PS-PRD memiliki tugas menggelar kongres secepat mungkin untuk memilih kepengurusan harian yang baru dan menjalankan amanat kongres. Kubu Sugeng Bahagio (pengurus lama Persatuan Rakyat Demokratik) tidak terima dilengserkan dari pimpinan PRD. Sugeng membentuk organisasi baru, yakni Persatuan Rakyat Demokratik Indonesia (Padi). Anggota Persatuan Rakyat Demokratik banyak yang kemudian bergabung ke Padi dibawah pimpinan Sugeng Bahagio.³⁰

3. Lahir Partai Rakyat Demokratik

PS-PRD berhasil merangkul hampir semua kelompok hingga membentuk front aksi bersama organisasi sektoral di bawah payung Persatuan Rakyat Demokratik. PS-PRD bersama dengan organisasi sektoral dibawah payung Persatuan Rakyat Demokratik mencetuskan ide untuk mendirikan sebuah partai politik. Mereka menyepakati diselenggarakan Kongres Luar Biasa Persatuan Rakyat Demokratik pada 14-16 April 1996 di Sleman, Yogyakarta.³¹ Kongres tersebut menandai terjadinya perubahan bentuk PRD yang dahulu sebagai sebuah organisasi masyarakat kemudian dirubah menjadi partai politik.

Kongres Luar Biasa Persatuan Rakyat Demokratik pada 15 April 1996 di Sleman, Yogyakarta memutuskan bahwa Persatuan Rakyat Demokratik berubah bentuk menjadi Partai Rakyat Demokratik (PRD). Kongres membahas mengenai Masyarakat Indonesia Revolusi Indonesia (MIRI), strategi taktik, kondisi internasional, program perjuangan, bentuk-bentuk organisasi, dan slogan semboyan. Kongres dihadiri sekitar 50 delegasi perwakilan dari sektor mahasiswa, buruh, petani, budayawan, dan rakyat miskin kota. Kongres

²⁸Budiman Sudjatmiko, *Anak-Anak Revolusi Jilid I*, hlm. 421.

²⁹Wawancara Petrus Hariyanto, 17 Juli 2017.

³⁰*Forum Keadilan* No. 9, Tahun V, 12 Agustus 1996.

³¹Wawancara Petrus Hariyanto, 17 Juli 2017.

diselenggarakan secara tertutup, tidak ada liputan dari media massa.³² Kongres tersebut juga dihadiri oleh kelompok peninjau (*observer*) dari *Conselho Nacional de Resistência Maubere* (CNRM, Dewan Perlawanan Timor Leste untuk kemerdekaan) dan *Democratic Social Partay* (DSP, Partai Sosial Demokrat Australia).³³ Pemilihan ketua umum PRD dilakukan melalui voting, calon yang diusulkan yaitu Dita Indah Sari dan Budiman Sudjatmiko. Terpilih sebagai Ketua Umum PRD yakni Budiman Sudjatmiko, yang dibantu oleh Petrus Hariyanto (Sekretaris Jenderal PRD), I Gusti Agung Anom, Ken Budha Kusumandaru, Ria Susanti, JE Kurniawan, dan Hendry Kuok.³⁴ Kesimpulan dari Kongres I pendirian PRD dijelaskan dalam Manifesto PRD yang dibacakan sebagai Deklarasi Partai Rakyat Demokratik di YLBHI pada 22 Juli 1996.³⁵

Deklarasi PRD dilakukan pada 22 Juli 1996 di kantor YLBHI Jakarta. Agenda Deklarasi PRD diisi dengan pidato deklarasi Partai Rakyat Demokratik oleh Ketua Umum PRD, pembacaan manifesto Partai Rakyat Demokratik, dan pembacaan puisi oleh Wiji Thukul serta Hanif Dhakiri. Deklarasi PRD dimulai sekitar pukul 14.00 WIB dengan durasi acara sekitar 1 jam. Tokoh YLBHI Mulyana W. Kusuma ikut hadir dalam acara tersebut.³⁶ Tokoh nasional lain yang hadir diantaranya Goenawan Muhammad, Sri Bintang Pamungkas, dan Pramodya Ananta Toer. Puluhan wartawan hadir dalam acara tersebut, namun keesokan harinya tidak ada media massa yang berani memuat peristiwa tersebut.³⁷

Rekrutmen calon anggota PRD dilakukan dengan tidak dibatasi oleh jenis kelamin, ras (suku bangsa) dan agama, namun harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk bisa menjadi anggota. PRD mensyaratkan anggota untuk memiliki pemahaman tentang prinsip-prinsip sosial demokrasi kerakyatan, memiliki pemahaman tentang prinsip-prinsip organisasi progresif, dan telah terlibat dalam aksi-aksi massa. Seorang calon anggota juga harus mengikuti pendidikan dengan materi-materi yang telah ditentukan. Materi pendidikan calon anggota terdiri dari permasalahan tentang Sosial Demokrasi Kerakyatan, problem pokok masyarakat Indonesia, tentang organisasi progresif, dan pengenalan serta pemahaman AD/ART PRD. Sedangkan calon anggota yang akan dilantik menjadi anggota resmi harus memenuhi syarat telah melalui masa pengujian dan telah dinyatakan berhasil berhak dilantik menjadi anggota.

³²Wawancara Neneng, 13 Agustus 2017 dan wawancara Vije, 13 Agustus 2017.

³³PRD, *Demi Demokrasi, Partai Rakyat Demokratik (PRD) Menolak Takluk*, hlm. 22.

³⁴Budiman Sudjatmiko, *Anak-Anak Revolusi Jilid I*, hlm. 428.

³⁵PRD, *Demi Demokrasi, Partai Rakyat Demokratik (PRD) Menolak Takluk*, hlm. 22.

³⁶Wawancara Kelik Ismunanto, 25 Mei 2017.

³⁷Budiman Sudjatmiko, *Anak-Anak Revolusi Jilid I*, hlm. 445.

Secara umum anggota PRD dapat dikelompokkan dalam golongan mahasiswa, petani, buruh, dan seniman. PRD juga memiliki organisasi masa yang terdiri dari PPBI (organisasi buruh), SMID (organisasi mahasiswa), STN (organisasi petani), dan JAKER (organisasi seniman) yang memiliki hubungan sebagai afiliasi politik dan organisasi. Rekrutmen anggota banyak dilakukan pada organisasi-organisasi massa yang memperjuangkan demokrasi, serta elemen-elemen progresif dari semua sektor rakyat. Setiap anggota bekerja secara sukarela tanpa ada sebuah imbalan. Anggota tulus berjuang karena kecintaanya kepada Indonesia.³⁸

PRD memiliki beberapa mekanisme untuk mendapatkan sumber pendanaan kegiatan partai. Pendanaan operasional partai berasal dari uang iuran anggota, sumbangan dan lain-lain yang sesuai dengan prinsip perjuangan, dan usaha mandiri yang sesuai dengan prinsip perjuangan. Sumber lain menyebutkan bahwa PRD sebelum dilarang oleh pemerintah Orba mendapatkan pendanaan dari YLBHI, namun setelah dinyatakan terlarang maka tidak ada yang berminat menjadi donatur PRD lagi.³⁹ Pendanaan kegiatan PRD didukung oleh beberapa dosen, agamawan Kristen maupun Katholik, dan kalangan ulama Islam.⁴⁰ Beberapa tokoh lokal yang secara diam-diam menentang pemerintah Orba juga mendukung pendanaan aktivitas partai.⁴¹ PRD juga memperoleh dana dari menjual majalah dan terbitan kepada anggota DPR dari fraksi PPP maupun fraksi PDI. Dana partai juga diperoleh dari anggota-anggota yang bekerja untuk membantu LSM.⁴² Dana yang berhasil dikumpulkan oleh PRD digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan partai.

Perjuangan mewujudkan ekonomi kerakyatan berdasar UUD 1945 pasal 33 menjadi cita-cita mulia PRD untuk memberi kesempatan yang sama dalam bidang ekonomi kepada semua masyarakat tidak hanya mereka yang dekat kekuasaan dan memiliki uang banyak. Pemerintah Orba selalu mendukung penerapan ekonomi kerakyatan dalam setiap programnya. Berbagai kebijakan pemerintah memang mampu meningkatkan ekonomi Indonesia dan menyelamatkan keterpurukn ekonomi Indonesia semasa Orde Lama. Tidak hanya itu pemerintah juga mampu menciptakan situasi perekonomian yang stabil sehingga tercapailah kemajuan ekonomi Indonesia dalam waktu yang cukup lama sebelum diterpa krisis moneter 1997-1998. Perlu di garis bawahi bahwa kemajuan ekonomi waktu itu hanya dirasakan sebagian masyarakat yang mereka berada di perkotaan atau dekat pusat kekuasaan, mereka yang

³⁸Wawancara Agus Jabo Priyono, 31 Maret 2015.

³⁹Wawancara Nezar Patria, 15 April 2015.

⁴⁰Wawancara Neneng, 13 Agustus 2017.

⁴¹Wawancara Kelik Ismunanto, 25 Mei 2017.

⁴²Wawancara Budiman Sudjatmiko, 8 April 2015.

berada di pelosok dan pinggiran belum merasakan kemajuan yang telah dicapai bangsanya.⁴³ Oleh karena itu, PRD memiliki gagasan agar pemerintah menjalankan suatu sistem perekonomian kerakyatan yang dapat dinikmati seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

Aktivitas utama PRD adalah menyebarluaskan gagasan dan program perjuangan PRD, membangun persatuan nasional, memperluas struktur organisasi dan melakukan kaderisasi dengan pendidikan ideologi, politik, dan organisasi.⁴⁴ Sebagai sebuah partai politik, PRD memilih metode mobilisasi dan organisasi massa dalam rangka memperjuangkan tuntutan-tuntutannya. Metode ini dipilih karena dalam sistem politik Indonesia saat itu tidak ada kesempatan untuk menyalurkan tuntutan mereka secara formal. Perjuangan PRD juga dilakukan dalam setiap lini. Di lini lokal, PRD mengorganisir rakyat dari pabrik, desa, kampung kota, perkebunan maupun kampus. Di lini nasional, PRD sebagai partai politik perjuangan. Di lini internasional, PRD mengutus duta-duta untuk bicara di berbagai forum pada tingkat global maupun regional, yaitu Asia.⁴⁵ PRD melakukan perlawanan terhadap pemerintah tanpa terbayangkan sebelumnya. Secara intelektual mereka mengambil *marxisme* sebagai landasan berfikir untuk melawan. Dari segi praksis mereka mengambil semua jalan yang diperkenankan seperti demonstrasi, memelopori pemogokan buruh.⁴⁶

PENUTUP

PRD berdiri akibat otoriterisme pemerintah dan sikap represif pemerintah terhadap rakyat. PRD didirikan oleh mereka yang tidak puas dengan sikap pemerintah dan juga didukung oleh mereka yang tertindas oleh pemerintah. PRD berdiri dengan berbagai dinamika dalam proses yang tidak singkat. Pada 1992, embrio PRD telah hadir dalam bentuk komite-komite aksi. Tahun-tahun berikutnya berdiri organisasi perlawanan tingkat sektoral, yang kemudian bergabung menjadi satu dalam payung Persatuan Rakyat Demokratik. Organisasi ini ternyata muncul dinamika, dimana terjadi perbedaan pendapat antar anggota. Organisasi yang hampir karam kemudian beberapa anggota berusaha menyelamatkan organisasi. Pada 1996, diadakan Kongres Luar Biasa untuk penyelamatan organisasi. Kongres memutuskan merubah Persatuan

⁴³“BudimanSudjatmiko Menyanggah: Kami bukan Komunis”,<http://www.republika.co.id>

⁴⁴Wawancara Agus Jabo Priyono, 3 November 2014

⁴⁵Budiman Sudjatmiko, *Anak-Anak Revolusi Jilid I*, hlm. 432.

⁴⁶Daniel Dhakidae, *Cendekiawan dan Kekuasaan Dalam Negara Orde Baru* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 724.

Rakyat Demokratik menjadi Partai Rakyat Demokratik. Pergerakan menjadi lebih terarah dan semakin radikal. Pendirian PRD merupakan simbolisme perlawanan terhadap pemerintah Orba. PRD dapat dikatakan organisasi pemula dalam melawan hegemoni Orba.

DAFTAR PUSTAKA

- Crouch, Harold., *Militer dan Politik di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999)
- Dhakidae, Daniel., *Cendekiawan dan Kekuasaan Dalam Negara Orde Baru* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 724.
- Garraghan, Gilbert., *A Guide to Historical Method* (New York: Fordham University Press, 1947)
- Herlina, Nina., *Metode Sejarah* (Bandung: Satya Historika, 2008)
- Kusuma, Mulyana W. et. al., *Laporan Keadaan Hak Asasi Manusia di Indonesia 1989* (Jakarta: YLBHI, 1990), hlm. 2-6.
- PRD., *Demi Demokrasi, Partai Rakyat Demokratik (PRD) Menolak Takluk* (Jakarta: Partai Rakyat Demokratik, 1999)
- Rajab, Budi., “Negara Orde Baru: Berdiri di Atas Sistem Ekonomi dan Politik yang Rapuh”, *SOSIOHUMANIORA*, Vol. 6, Nomor 3, November 2004
- Ricklefs, M.C., *A History of Modern Indonesia 1200-2004* (Stanford: Stanford University Press, 2001)
- Soetrisno, Loekman, et al., *Menyingkap Retorika dan Realita: Refleksi dan Visi Jejak 50 Tahun Indonesia* (Bandung: AKATIGA, 1995)
- Sudjatmiko, Budiman., *Anak-Anak Revolusi Jilid I* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013)
- Widjojo, Muridan, et al., *Penakluk Rezim Orde Baru, Gerakan Mahasiswa 1998* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999)